

BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

BULETIN DWI WULAN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Edisi VI / 2012

**Sistem Rantai Pasok Material dan
Peralatan Konstruksi untuk Mendukung Investasi Infrastruktur**

Inisiasi dan Perumusan Business Plan Investasi Infrastruktur

**Permen PU No. 08 Tahun 2012 : Pedoman Peraturan LPJK
(Perlem) Nomor 07, 08, Dan 09 Tahun 2012**

Sekilas Tentang :
Peraturan Presiden No. 70/2012 Mengenai Perubahan Kedua
Perpres No. 54/2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

ISSN 1907-0136



Bauma 2013

30th International Trade Fair for Construction
Machinery, Building Material Machines,
Mining Machines, Construction Vehicles and
Construction Equipment. 15–21 April 2013, Munich



Fascination Bauma 2013

Giant machines on 555,000 m² of exhibition space with 3,256 exhibitors and 420,170 visitors—bauma is the largest and perhaps the most impressive trade fair in the world. However, the undisputed leading international trade fair is also enthralling because it is so comprehensive. It features all sectors, all market leaders and plenty of innovations.



PARTNER
COUNTRY

Indonesia

BULETIN BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI

Pembina/Pelindung :

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi .

Dewan Redaksi :

Sekretaris Badan Pembinaan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Usaha & Kelembagaan;
Kepala Pusat Pembinaan Penyelenggaraan Konstruksi;
Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi;
Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan
Konstruksi.

Pemimpin Umum :

Mahbullah Nurdin.

Pemimpin Redaksi :

Hambali.

Penyunting / Editor :

Kristinawati Pratiwi Hadi;
Dendy Rahadian.

Redaksi Sekretariat :

Gigih Adikusomo;
Budiasih Dyah Saraswati;
Koko Gilang Nugroho;
Anjar Pramularsi;
Maria Ulfah.

Administrasi dan Distribusi :

Nanan Abidin;
Sugeng Sunyoto;
Agus Firngadi;
Ahmad Suyaman;
Ahmad Iqbal.

Desain dan Tata Letak:

Nanang Supriyadi;
Y. Bisma Wikantayasa.

Fotografer :

Sri Bagus Herutomo.

Alamat Redaksi :

Gd. Gedung Utama Lt. 10
Jl. Pattimura No.20 - Kebayoran Baru
Jakarta Selatan
Tlp/Fax. 021-72797848
E-Mail : datinfo25@yahoo.com

Salam dari redaksi

*S*alam hangat dan bersemangat tak bosan kami sampaikan kepada pembaca Buletin Badan Pembinaan Konstruksi di mana pun berada, dengan kehangatan diharapkan Bapak/Ibu selalu dinaungi hal yang positif dalam menjalin hubungan dengan rekan kerja, kepada bawahan dan atasan. Dengan salam semangat, timbul agar para pembaca Bpk/Ibu, memiliki semangat yang tak kunjung padam dalam menjalani kehidupan ini untuk berbuat kebajikan kepada sesama.

Pembaca yang budiman, tak terasa kita sudah dipenghujung tahun 2012, puji dan syukur ke hadirat TUHAN YME keberadaan kami masih bisa diterima oleh para pembaca. Akhir tahun ini kami ingin mengucapkan Selamat Merayakan Hari Raya Natal bagi Bpk/Ibu yang merayakannya, dan Kami ucapkan Selamat Tahun Baru 2013 yang akan kita lewati beberapa hari lagi. Semoga Awal Tahun 2013 nanti bisa menjadi patokan awal kita untuk selalu melihat ke depan bekerja lebih baik lagi. Pengalaman di tahun belakang kita jadikan pelajaran berharga yang akan mendukung kehidupan kita di depan.

Buletin Badan Pembinaan Konstruksi edisi akhir tahun ini membawa informasi hangat terkait dunia konstruksi di tanah air. Pada edisi VI di tahun 2012 ini, redaksi menyajikan liputan utama, Sistem Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi untuk Mendukung Investasi Infrastruktur, Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi, M.Natsir, berkesempatan memberikan paparannya. Bantuan Teknis Kepada Aparat di Prov.Sumatera Barat, juga diberikan oleh Pusat 3 ini, IDB (2010) melaporkan, bahwa kenaikan investasi infrastruktur sebesar 1% di Indonesia, akan memberikan kontribusi sebesar 0,3% terhadap PDB, Pemerintah Indonesia telah menetapkan, bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam program pembangunan nasional, melalui MP3EI.

Forum Jasa Konstruksi Nasional diadakan kembali pada tahun ini (FJKN 2012) dalam rangka meningkatkan peran jasa konstruksi dalam pembangunan infrastruktur nasional untuk mewujudkan MP3EI dan pembangunan berwawasan lingkungan. Simak liputan selengkapnya pada edisi kali ini.

Pada edisi kali ini pun kami akan membawa anda ke Lapangan Golf. Dalam rangka Konstruksi Indonesia 2012 masyarakat jasa konstruksi mengadakan pertandingan amal untuk dunia pendidikan Indonesia dan aktivitas sosial kemasyarakatan untuk masyarakat yang membutuhkan.

Pembaca yang budiman Buletin Badan Pembinaan Konstruksi berusaha untuk memahami keingintahuan anda, semoga bermanfaat dan Selamat membaca...!!

Salam Hangat dan Bersemangat

Daftar Isi

► Sistem Rantai Pasok Material dan Peralatan Konstruksi untuk Mendukung Investasi Infrastruktur	2
► Inisiasi dan Perumusan Business Plan Investasi Infrastruktur	5
► Meningkatkan Peran Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Infrastruktur Nasional untuk Mewujudkan MP3EI dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan	7
► Sekilas Tentang : Peraturan Presiden No. 70/2012 Mengenai Perubahan Kedua PERPRES No. 54/2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah	9
► Bauma 2013 Indonesia as The Partner Country	11
► Permen PU No. 08 Tahun 2012 : Pedoman Peraturan LPJK (PERLEM) Nomor 07, 08 dan 09 Tahun 2012	12
► Kementerian PU Timor Leste Membutuhkan Support Lebih dari Indonesia	14
► Charity Golf Konstruksi Indonesia 2012 : Antara Kompetisi dan Kepedulian Sosial	17
► Kisah Tauladan Seorang Pemimpin	20

SISTEM RANTAI PASOK MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI UNTUK MENDUKUNG INVESTASI INFRASTRUKTUR

Ir. Mochammad Natsir, M. Sc.
dan Gigih Adikusuma, ST

PENDAHULUAN

Investasi Infrastruktur

Indonesia merupakan negara berkembang, terdiri dari pulau pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara, meskipun Indonesia kaya akan sumber daya alamnya, namun kondisi ekonomi Indonesia masih belum banyak berkembang secara signifikan sejak kemerdekaan RI pada tahun 1945. Tidak bisa dipungkiri bahwa volume kegiatan ekonomi salah satunya dipengaruhi oleh infrastruktur. Saat ini kondisi infrastruktur Indonesia masih memprihatinkan. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur, fisik dan nonfisik kurang memadai. Padahal kondisi ekonomi yang tengah berkembang seperti Indonesia mutlak memerlukan pengembangan infrastruktur di berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur saat ini masih banyak berpusat di wilayah wilayah tertentu, kurangnya pemerataan pembangunan infratraktur tersebut mengakibatkan kurang bertumbuhnya ekonomi di beberapa wilayah daerah terpencil di Indonesia. Oleh karena itu sangat diperlukan pembangunan infrastruktur terutama didaerah daerah terpencil agar dapat meningkatkan kapasitas ekonomi daerah tersebut. Dana yang ditanamkan untuk penyelenggaraan infrastruktur setiap tahun mengalami peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hasil studi Islamic Development Bank, kebutuhan investasi infrastruktur pada periode 2010 - 2014 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang diperkirakan pada tahun 2014 akan mencapai 7,0 - 7,7% pertahun adalah sebesar 5% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) atau senilai Rp1.924 Triliun. Dana investasi infrastruktur tersebut berasal dari pemerintah melalui anggaran APBN dan APBD, BUMN dan BUMD, dan swasta.

Untuk mendukung investasi infrastruktur tersebut diperlukan dukungan sumber daya input konstruksi, termasuk material dan peralatan konstruksi. Penyediaannya dilakukan para pemasok, pembuatannya oleh para produsen, dan penggunaannya oleh para pelaku konstruksi. Distribusinya memerlukan sistem transportasi dan sistem pergudangan. Seluruh proses tersebut membentuk rantai pasok yang melibatkan berbagai pelaku yang berbeda.

Investasi tidak hanya dibutuhkan pada produk konstruksi berupa infrastrukturnya saja tetapi mencakup seluruh komponen pada rantai pasok tersebut.

Material dan Peralatan Konstruksi

Industri konstruksi merupakan sektor industri yang menghasilkan produk berupa prasarana fisik dan sarana dasar bagi kegiatan sektor perekonomian dan kegiatan sosial masyarakat. Produk industri dihasilkan atas dasar permintaan dari pemberi kerja (pemerintah atau swasta) dan dibuat oleh pihak kedua yang dikontrak

(kontraktor), dengan mengerahkan berbagai sumberdaya seperti bahan konstruksi, peralatan, dan tenaga kerja. Dalam proses produksinya berbagai material konstruksi, mulai dari bahan mentah seperti pasir, batu sampai bahan setengah jadi seperti rangka atap baja, balok beton pracetak, serta komponen lain seperti peralatan mekanikal dan elektrikl dipasok oleh berbagai pemasok yang bertingkat-tingkat, kemudian dirakit di lokasi proyek oleh para kontraktornya, baik kontraktor utama maupun sub kontraktor. Perkembangan penyelenggaraan konstruksi nasional yang demikian pesat, telah menuntut para penyelenggara konstruksi untuk lebih memperhatikan sumber daya konstruksi lainnya. Pada masa lalu, nilai kegiatan konstruksi relatif kecil dibandingkan dengan input sumber daya konstruksi yang tersedia. Material, SDM, teknologi, dan peralatan dianggap melimpah untuk mendukung investasi konstruksi setiap tahunnya. Permasalahan yang sering dijumpai di lapangan lebih banyak disebabkan oleh kekurangan biaya dan keterlambatan waktu pelaksanaan.



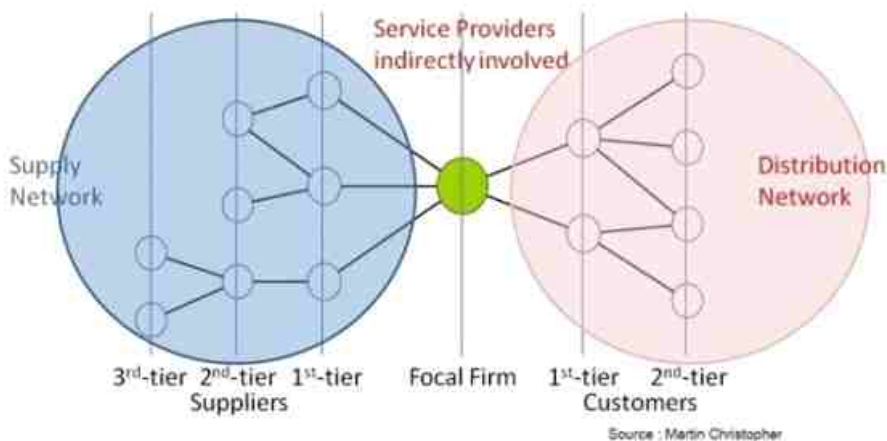
Namun demikian, seiring dengan nilai konstruksi yang terus menerus semakin besar, tetapi di sisi lain ketersediaan material, SDM, teknologi, dan peralatan yang masih terbatas, membuat jalur kritis suatu penyelenggaraan konstruksi tidak lagi hanya pada aspek biaya dan waktu. Oleh karena itu, penguasaan rantai pasok material dan peralatan konstruksi ke depan akan semakin penting, tidak lagi sekedar wacana, tetapi merupakan kebutuhan.

RANTAI PASOK DAN PENGELOLAANNYA

Sistem Rantai Pasok

Rantai pasok (*supply chain*) adalah sistem yang mencakup pelaku, pemasok, pembuat, transportasi, distributor, vendor, dan penjamin yang diciptakan untuk mengubah bahan dasar menjadi suatu produk dan memasok produk tersebut kepada pengguna sesuai nilai yang diminta. Oleh karena itu, penguasaan rantai pasok harus mencakup seluruh pihak yang terlibat dalam mensuplai sumberdaya mulai dari hulu hingga hilir rantai kegiatan.

Secara umum, sistem jaringan pasokan dan penggunaan/pemanfaatan produk manufaktur tersebut terbagi dalam 3 area yaitu pemasok utama (*vocal firm*), para pemasok dan para pelangganyang digambarkan oleh Martin Christopher (dikutip oleh Abduh, 2011) sebagai berikut:



Gambar 1. Sistem Jaringan Rantai Pasok

RANTAI PASOK KONSTRUKSI

Pengelolaan Rantai Pasok di Industri Konstruksi

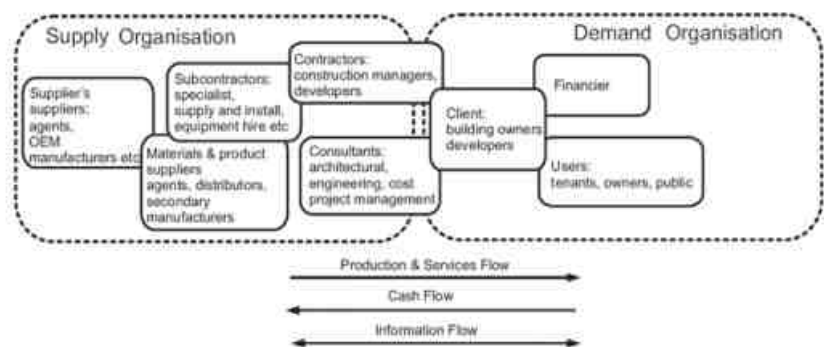
Pengelolaan Rantai Pasok adalah usaha koordinasi dan memadukan aktivitas penciptaan produk diantara pihak-pihak dalam suatu rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi operasi, kualitas, dan layanan kepada pelanggan untuk mendapatkan *sustainable competitive advantage* bagi semua pihak yang terkait dalam kolaborasi ini. Secara umum siklus hidup industri konstruksi dimulai dari idea perencanaan perancangan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan diakhiri dengan rekonstruksi/demolisi. Pada masing-masing tahap siklus hidup konstruksi tersebut didukung oleh sistem rantai pasok yang khas.

Rantai pasok yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan mendominasi pada tahap idea. Rantai pasok jasa keahlian dan dukungan peralatan investigasi banyak digunakan pada tahap perencanaan dan perancangan. Pada tahap pelaksanaan, pemeliharaan, dan rekonstruksi/demolisi banyak melibatkan pasokan material, teknologi, peralatan, dan tenaga konstruksi.

Tipikal Sistem Rantai Pasok Konstruksi

Secara umum struktur sistem rantai pasok konstruksi terdiri atas dua bagian, yaitu organisasi pada sisi "demand" dan organisasi pada sisi "supply". Kedua sisi organisasi tersebut dihubungkan oleh ikatan kontrak antara penanggung jawab utama kegiatan dengan penyedia jasa konstruksi.

Tipikal sistem rantai pasok konstruksi dapat digambarkan dalam skema berikut (Suraji, 2011).



Gambar 2. Tipikal Rantai Pasok Konstruksi

PERKIRAAN KEBUTUHAN DAN KAPASITAS RANTAI PASOK MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI UNTUK Mendukung Investasi INFRASTRUKTUR

Pemilihan Kategori Rantai Pasok

Material dan peralatan konstruksi meliputi seluruh material dan peralatan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan bagian pekerjaan dalam satu kesatuan pekerjaan pada suatu proses konstruksi. Oleh karena itu, input sumber daya material dan peralatan konstruksi untuk mewujudkan berbagai produk konstruksi dapat dikatakan tidak terbatas. Penerapan sistem rantai pasok untuk mengelola seluruh material dan peralatan konstruksi tersebut tentu saja tidak akan efisien dan efektif, karena selain mahal,

kapasitas manajemen tentu ada batasnya. Sesuai dengan prinsip pengkategorian rantai pasok, maka perlu dipilih material dan peralatan konstruksi yang akan dikelola sistem rantai pasoknya.

Pada tahap awal penerapan rantai pasok, sebaiknya dipilih kategori material dan peralatan konstruksi inti atau major, sedangkan tingkat kesulitan pasokannya tergantung pada lingkup yang ditinjau, apakah bersifat nasional atau daerah.

Pemilihan material dan peralatan konstruksi major dalam pembahasan ini dipilih berdasarkan kriteria sebagai berikut:

1. Lingkup nasional;
2. Ketersediaan terbatas atau perlu waktu cukup lama untuk meningkatkan ketersediaan;
3. Digunakan secara umum dalam kegiatan konstruksi;
4. Memiliki nilai industri yang signifikan;
5. Komponen yang signifikan dalam penyelesaian kegiatan konstruksi;
6. Fluktuasi harga rentan terhadap ketidakseimbangan sistem *supply demand*.

Berdasarkan kriteria di atas, material dan peralatan konstruksi major yang dipilih adalah semen, baja, aspal, dan alat berat. Ketersediaan agregat batu sering menjadi masalah di suatu daerah, tetapi belum menjadi isu nasional.

KEBERLANJUTAN MANAJEMEN RANTAI PASOK MATERIAL DAN PERALATAN KONSTRUKSI

Walaupun tidak mudah, penerapan *Supply Chain Management* (SCM) di industri konstruksi diyakini akan mampu meningkatkan kinerja industri konstruksi yang dikenal sebagai industri yang tidak efisien. Hasil analisis *supply demand* pada material semen, baja dan aspal, serta peralatan berat konstruksi telah memberikan informasi kepada seluruh pelaku industri konstruksi Indonesia untuk segera mengambil langkah-langkah

strategis dalam mengatasi berbagai kelemahan dalam penyelenggaraan industri konstruksi di masa depan. Jika kita lalai atau terlambat dalam mengambil sikap antisipasi, kemungkinan besar bisa terjadi, negara kita hanya menjadi penonton yang tidak mampu memanfaatkan pasar konstruksi raksasa yang terjadi di dalam negeri untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Langkah antisipasi dalam mengamankan investasi infrastruktur ke depan hanya dapat dilakukan dengan efektif apabila didasarkan pada hasil analisis yang didukung dengan data yang akurat. Mulai tahun 2011, Kementerian PU melalui Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi (Pusbin SDI) BP Konstruksi, sedang mengembangkan Sistem Informasi Sumber Daya Investasi (SISDI) yang mengkompilasi data base pasar, rencana investasi, material dan peralatan konstruksi. Mengingat data yang dibutuhkan sangat besar dan sebarannya sangat luas yang mencakup seluruh wilayah Indonesia, maka pengumpulan data tersebut tidak dapat dilakukan oleh Pusbin SDI sendiri sebagai pengelola SISDI, tetapi perlu melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti pembina, pengguna, pemasok, produsen, distributor, agen, dan masyarakat konstruksi. Ke depan, diperlukan pengaturan yang lebih mengikat untuk menjamin keberlanjutan pendataan sumber daya konstruksi tersebut.

KESIMPULAN

Pengelolaan sistem rantai pasok material dan peralatan konstruksi difokuskan pada material dan peralatan major yang penyediaannya sangat tergantung pada industri konstruksi dan ketersediaannya sangat berpengaruh pada proses konstruksi.

Keseimbangan *supply* dan *demand* material dan peralatan konstruksi dapat terjadi apabila ada kerjasama yang sinergis antara pembina konstruksi, pengguna dan pemasok material dan peralatan konstruksi. Para pelaku

industri yang memasok material dan peralatan konstruksi hanya dapat mengembangkan kapasitas produksinya apabila para pengguna menginformasikan kebutuhannya dan merumuskan program penggunaannya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 tahun ke depan. Dalam hal ini, para pembina konstruksi berperan strategis dalam menjembatani kepentingan pemasok dan pengguna material konstruksi dalam rangka pengembangan industri konstruksi nasional, peningkatan daya saing konstruksi nasional, dan penjaminan terhadap keamanan investasi konstruksi yang mencakup infrastruktur dan bangunan gedung.

Analisis *supply-demand* merupakan bagian yang melekat pada pengelolaan rantai pasok konstruksi. Berdasarkan hasil analisis, kapasitas industri semen nasional harus segera dikembangkan sedangkan kapasitas industri baja masih mencukupi untuk memenuhi kebutuhan konstruksi dalam 35 tahun ke depan. Pasokan aspal untuk mendukung penyelenggaraan jaringan jalan sudah dalam keadaan kritis, sehingga potensi aspal alam di Buton perlu segera dikembangkan agar tidak tersandera oleh pasokan aspal impor.

Industri alat berat nasional sudah berkembang dengan baik tetapi tetap memerlukan dukungan dari pemerintah berupa perlindungan dari invasi pasar asing dan informasi kebutuhan alat berat untuk mendukung investasi di sektor konstruksi baik yang dilaksanakan pemerintah maupun swasta. Jumlah alat berat yang beroperasi di lapangan perlu dipantau dengan baik.

Penggunaan teknologi GPS dapat dimanfaatkan untuk keperluan pemantauan ini. Dengan demikian, para pelaku industri dapat membaca tingkat keseimbangan sistem *supply-demand* alat berat dalam rangka pengembangan kapasitas industrinya.

Penulis adalah Kepala Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi, dan Staf Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi Badan Pembinaan Konstruksi, Kementerian Pekerjaan Umum

Inisiasi dan Perumusan *Business Plan* Investasi Infrastruktur

Contoh Kasus Pembangunan Jalan Tol Di Provinsi Sumatera Barat



Bantuan Teknis Kepada Aparat di Prov. Sumatera Barat

Perbaikan dan peningkatan ekonomi dalam negeri memerlukan dukungan infrastruktur memadai. Tanpa dukungan itu, perekonomian akan menjadi cepat *overheated*, karena respon dari sisi supply terhadap demand menjadi terhambat. Tahun 2012 Presiden menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 7%, atau naik sebesar 0,5% dari tahun 2011 yang tumbuh relatif tinggi sebesar 6,5% (data: BPS), sementara itu, investasi infrastruktur tahun 2011 belum memenuhi harapan, yaitu sekitar 4% dari Produk Domestik Bruto/PDB (data: Bappenas) dari minimal kebutuhan sekitar 5% PDB.

Berbagai kajian dilakukan hasilnya menunjukkan infrastruktur yang lebih baik akan memberikan kontribusi terhadap kenaikan pertumbuhan ekonomi. IDB (2010) melaporkan, bahwa kenaikan investasi infrastruktur sebesar 1% di Indonesia, akan memberikan kontribusi sebesar 0,3% terhadap PDB. Menyadari hal tersebut, Pemerintah Indonesia telah menetapkan, bahwa pembangunan infrastruktur menjadi prioritas utama dalam program pembangunan nasional, melalui MP3EI.

Dalam rangka merespon dan kebutuhan jumlah dan meningkatkan kemampuan serta pengetahuan SDM penyelenggara investasi infrastruktur serta untuk memastikan program pembangunan infrastruktur yang dicanangkan oleh pemerintah dapat terwujud dengan baik. Pusat Pembinaan Sumber Daya Investasi Badan Pembinaan Konstruksi (BP Konstruksi) menyelenggarakan Bantuan Teknis Investasi Infrastruktur, "Inisiasi dan Perumusan *Business Plan*

Jalan Tol di Sumatera Barat", (5/12) di Padang.

Pusbin SDI, BP Konstruksi merespon kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dalam menyiapkan dan menyelenggarakan proyek KPS. Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, maka Bantek ini terutama diperuntukkan bagi SDM aparat Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat yang akan dilewati jaringan Jalan Tol agar diperoleh kesepahaman terkait investasi infrastruktur Jalan Tol. Dengan demikian Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang telah dicanangkan dapat dimaknai secara seragam 7 antara Pusat dan Daerah. Sehingga Daerah dapat memaksimalkan potensi yang akan timbul akibat terbangunnya infrastruktur Jalan Tol tersebut.

Upaya Pemerintah dalam Pembangunan

Untuk mewujudkan program pembangunan yang telah dicanangkan,

Pemerintah telah dan akan terus melakukan berbagai upaya fasilitasi, baik dalam bentuk dukungan regulasi maupun pembentukan lembaga dan dukungan pendanaan (fiskal).

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Bambang Goeritno menjelaskan, bidang regulasi, berbagai peraturan perundang diperbaiki, termasuk undang-undang sektor (seperti UU Sumber Daya Air serta Jalan dan Jalan Tol) dan Peraturan Presiden tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS). Pemerintah menerbitkan Perpres Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Terkait sektor jalan tol, Pemerintah telah mensahkan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur akan diselesaikan maksimal dalam waktu 256 hari.



Dalam bidang kelembagaan, Pemerintah telah membentuk Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI), PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT. PII) serta Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP).

Pemerintah juga telah dan akan terus memberikan dukungan pendanaan bagi Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), seperti *Land Revolving Fund*, *Land Capping*, *Infrastructure Fund*, dan *Guarantee Fund*.

Disamping itu, Pemerintah akan melanjutkan upaya perbaikan regulasi seperti kebijakan "*Land Freezing*", serta Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 dan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pemerintah pun melanjutkan kebijakan dukungan non-pendanaan, seperti *Project Development Facility* (PDF) dalam rangka penyiapan proyek KPS, penyediaan lahan yang dimiliki Pemerintah, penyertaan modal sampai tingkat tertentu melalui BUMN, serta insentif fiskal lainnya yang saat ini masih dipersiapkan.

Pemerintah juga telah dan akan terus memberikan dukungan pendanaan bagi Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta (KPS), seperti *Land Revolving Fund*, *Land Capping*, *Infrastructure Fund*, dan *Guarantee Fund*. Disamping itu, Pemerintah juga akan melanjutkan upaya perbaikan regulasi seperti kebijakan "*Land Freezing*", serta Peraturan Presiden Nomor 56 Tahun 2011 dan Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur.

Pemerintah juga akan melanjutkan kebijakan dukungan non-pendanaan, seperti *Project Development Facility* (PDF) dalam rangka penyiapan proyek

KPS, penyediaan lahan yang dimiliki Pemerintah, penyertaan modal sampai tingkat tertentu melalui BUMN serta insentif fiskal lainnya yang saat ini masih dipersiapkan.

Tantangan Yang Dihadapi

Proses yang dijalankan bukan tanpa hambatan, berbagai upaya fasilitasi yang bersifat makro telah dilakukan Pemerintah, namun penyediaan infrastruktur melalui KPS dinilai masih lambat. Hal ini karena masih terdapat berbagai kendala yang sifatnya mikro.

Beberapa tantangan yang dihadapi oleh pihak swasta diantaranya pelaksanaan pembebasan lahan, masih luasnya koordinasi antar lembaga Pemerintah, beban pajak dan skema pembayarannya, pendanaan pinjaman dari perbankan komersial serta kebijakan Pemerintah yang akan mempengaruhi pendapatan seperti konektivitas dan persaingan dengan jaringan jalan non-tol.

Hal tersebut ditambah desentralisasi yang berjalan belum maksimal, koordinasi yang lemah serta kurang tegasnya pembagian peran dan kewenangan diantara lembaga Pemerintah yang terkait, membuat proses penyiapan proyek KPS memakan waktu yang tidak sebentar bahkan membuat frustrasi pihak swasta yang berurusan dengan aparat Pemerintah.

Usaha Mengatasi Kesenjangan Bersama

Kompetensi dalam penyiapan proyek KPS juga harus dimiliki oleh pihak pelaku swasta, termasuk dalam menyiapkan inovasi pola pendanaan proyek KPS. Pihak swasta harus mampu mengetahui lebih dalam, sehingga akan memperkecil risiko bagi pihak swasta sendiri, dan suatu ketika menuntut dukungan Pemerintah akan mudah dipenuhi atau proposal kerja sama mendapat dukungan dari berbagai pihak terkait.

Kapasitas lembaga dan sumber daya manusia (SDM) pemerintah yang berwenang yang masih lemah dan banyak menimbulkan masalah harus segera dilakukan peningkatan SDM. Maka dari itu untuk merespon kebutuhan peningkatan kapasitas SDM dalam menyiapkan dan menyelenggarakan proyek KPS.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum, dilaksanakanlah bantuan teknis bagi SDM aparat Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera agar diperoleh kesepahaman terkait investasi infrastruktur Jalan Tol. Dengan demikian Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur yang telah dicanangkan dapat dimaknai secara seragam antara Pusat dan Daerah, sehingga Daerah dapat memaksimalkan potensi yang akan timbul akibat terbangunnya infrastruktur Jalan Tol tersebut. (Pusbin SDI - dndy).



Meningkatkan Peran Jasa Konstruksi dalam Pembangunan Infrastruktur Nasional untuk Mewujudkan MP3EI dan Pembangunan Berwawasan Lingkungan

Forum Jasa Konstruksi Nasional Tahun 2012



Pertumbuhan usaha jasa konstruksi ke depan sangat prospektif, dan secara langsung akan berdampak positif bagi perekonomian nasional, sehingga bisnis konstruksi ke depan akan semakin menjanjikan karena kecenderungan peningkatan permintaan sebagai konsekuensi dari percepatan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah tanah air.

Di tengah pembahasan prospek jasa konstruksi yang akan terus meningkat, Djoko Kirmanto pun dengan sigap menanggapi isu lingkungan menjadi isu pokok dalam berbagai aktivitas manusia, salah satunya adalah kegiatan pembangunan infrastruktur. Hal ini yang ia utarakan didepan para para pemangku kepentingan jasa konstruksi nasional, para pemilik badan usaha konstruksi, unsur pemerintah, asosiasi badan usaha konstruksi, asosiasi profesi, para akademisi / ahli dan pakar konstruksi hadir untuk memberikan pandangan-pandangannya dalam Forum Jasa Konstruksi Nasional 2012.

FJKN merupakan amanah dari peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi yang dilaksanakan setiap

Pemerintah mengeluarkan kebijakan perencanaan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI), yang di dalamnya terkandung upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan salah satunya melaksanakan pemerataan pembangunan infrastruktur di setiap wilayah Indonesia.

Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, dalam acara Forum Jasa Konstruksi Nasional 2012 berlangsung beberapa akhir November 2012 lalu.

Keberadaan jasa konstruksi, baik yang berskala kecil, menengah, ataupun yang besar, seluruhnya mempunyai nilai strategis bagi pembangunan di Indonesia, mengingat peran yang cukup besar, serta jutaan tenaga kerja yang terlibat di dalamnya.

Dalam melaksanakan pemerataan pembangunan infrastruktur tersebut didalamnya tidak bisa dipisahkan dengan kegiatan jasa konstruksi, sehingga kondisi ini merupakan pasar konstruksi yang sangat besar bagi para penyedia jasa konstruksi, karena kecenderungan nilai kapitalisasi sektor konstruksi yang terus meningkat.

Jasa konstruksi di Indonesia telah dan akan memberikan peluang yang besar bagi penyerapan tenaga kerja yang memiliki keahlian dan keterampilan di bidang konstruksi, tersedianya lapangan pekerjaan, menciptakan pendapatan bagi tenaga kerja dan mengurangi angka pengangguran. Hal tersebut juga menjadi gambaran prospek penting Jasa Konstruksi ke depan yang dijelaskan oleh Menteri





tahun, para stake holder jasa konstruksi berusaha untuk menyamakan persepsi dan pemahaman sesuai tanggung jawabnya masing-masing, Forum ini memberikan bahan masukan kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan jasa konstruksi di masa mendatang.

Forum Jasa Konstruksi Nasional 2012 diselenggarakan dalam 2 tahap, yaitu Pra FJKN, yang dilakukan 1 (satu) minggu sebelum sidang FJKN 2012 di mulai, Pra FJKN dilaksanakan pada hari Rabu, 21 November 2012 di Hotel Sultan Jakarta.

Kegiatan Pra FJKN 2012, diikuti oleh 7 unsur masyarakat jasa konstruksi, diantaranya, Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi, Asosiasi Profesi Jasa Konstruksi, Asosiasi Perusahaan Barang & Jasa Mitra Usaha Jasa Konstruksi, Masyarakat Intelektual, Organisasi Kemasyarakatan Jasa Konstruksi, Instansi Pemerintah, Unsur-unsur Lain Terkait Jasa Konstruksi.

Pada kegiatan Pra FJKN ini ternyata hanya ada 6 unsur saja yang membentuk perwakilan unsur dan merumuskan hasil aspirasi, sedangkan unsur Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi tidak terbentuk perwakilan unsur dan rumusan aspirasi karena mengalami dead lock. Hasil susunan formatur sidang Pra FJKN 2012,



diantaranya, Unsur Asosiasi Profesi, berperan sebagai Ketua Sidang, yaitu Muhammad Amry, sebagai Sekretaris, Nur Wachid. Unsur Pemerintah, Sidang diketuai oleh Ir. Kimron Manik, M.Sc, dengan sekretaris, Dina Simbolon, SH, MH.

Untuk unsur Masyarakat Intelektual berperan sebagai Ketua Sidang yaitu Khrisna S. Pribadi, dengan Sekretaris, Krisna Mochtar. Unsur Ormas Ketua Sidang dipimpin oleh Ludy Eqbal, dengan Sekretaris, Elfin Adji Nantion. Yang terakhir dari Unsur Mitra sebagai Ketua Sidang yaitu Andi Hadiar Putra, dengan Sekretaris, Budi Susilo. Sedangkan dari Unsur Lain-lain, terpilih ketua Sidang, Reginaldo Sultan beserta Sekretaris Sanny Naury.

Penyelenggaraan Forum Jasa Konstruksi Nasional sendiri, dilaksanakan selama satu hari penuh, pada hari Rabu, tanggal 28 November 2012 di Hotel Sultan Jakarta. Sesi pemaparan kunci (*keynote speech*) pada kesempatan ini berasal dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kepala Divisi Integrasi Program Sekretariat KP3EI, Dr. Ir. Wahyu Utomo, MS.

Sesi selanjutnya dari sidang Forum Jasa Konstruksi Nasional 2012 adalah pembentukan formatur sidang FJKN untuk memilih Ketua dan Sekretaris Sidang. Formatur terdiri dari para Ketua Unsur yang terpilih dalam Pra Forum. Ketua Forum FJKN 2012, dipimpin oleh Muh. Amry (berasal dari Unsur Asosiasi Profesi), sedangkan Sekretaris Forum FJKN adalah Krishna S. Pribadi (dari Unsur Masyarakat Intelektual), dengan Anggota Forum FJKN 2012, diikuti oleh Reginaldo Sultan (Unsur lain-lain), Elfin Adji Nasution (Unsur Organisasi Masyarakat), Andi Hadiar Putra Anggota (Unsur Asosiasi Perusahaan Barang dan Jasa Mitra Usaha Jasa Konstruksi), Kimron Manik (Unsur Pemerintah).

Kemudian pembacaan rumusan aspirasi dari masing-masing unsur dilakukan oleh masing-masing sekretaris unsur. Khusus untuk pembacaan aspirasi Unsur Asosiasi Perusahaan yang belum dirumuskan pada saat Pra Forum, dibacakan oleh salah satu wakil Unsur Asosiasi Perusahaan yang hadir dalam Sidang FJKN, yaitu Joni Pidel Patandung (Aspertanas).

Para stake holder mengungkapkan berbagai kendala, serta memberikan usulan penyelesaian kendala tersebut di lapangan lalu diharapkan solusi terbaik serta terekomendasikannya usulan terkait upaya peningkatan kinerja masing-masing unsur pemangku kepentingan dalam menjalankan tugasnya sebagai mitra pemerintah. Dari Forum ini dapat menyatukan pemahaman yang sama dari semua unsur dalam menerjemahkan dan melaksanakan dengan tepat berbagai kebijakan pembinaan yang dilakukan Pemerintah di sektor konstruksi.

Menteri PU memberikan pandangannya, terdapat 2 (dua) sisi pembangunan infrastruktur dilakukan, pertama, tujuan pembangunan dan yang kedua, dampak pembangunan. Setiap kegiatan pembangunan dilaksanakan menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun dampak negatif, karena itu, "yang perlu diperhatikan adalah bagaimana melaksanakan pembangunan untuk mendapatkan hasil dan manfaat maksimal dengan dampak negatif lingkungan yang minimal, dengan memperhatikan aspek-aspek lingkungan, sehingga mengurangi dampak yang terjadi", ujar Djoko Kirmanto.

Pemerintah sebagai penanggung jawab dan penyelenggara pembangunan infrastruktur bersama-sama dengan penyedia jasa wajib menyelenggarakan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan sehingga tercipta infrastruktur yang berkelanjutan. Sehingga pekerjaan lapangan yang dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur sudah mulai memperhatikan aspek lingkungan. Ini tentu harus menjadi perhatian untuk di perbaiki, baik dari pihak proyek sebagai pemilik (*owner*) maupun penyedia jasa (kontraktor). (Dndy).



SEKILAS TENTANG : PERATURAN PRESIDEN NO.70/2012 MENGENAI PERUBAHAN KEDUA PERPRES NO.54 / 2010 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH

Berbagai cara dilakukan untuk membuat sebuah peraturan menjadi lebih baik, dengan harapan peraturan tersebut sebagai perbaikan peraturan sebelumnya, semakin responsive dalam menjawab tantangan sekarang, dan tantangan ke depan serta dinamis dalam menyikapi perubahan jaman. Untuk itulah dibuat perubahan atau revisi atas sebuah peraturan.

Beberapa kalangan menilai adanya revisi atau perubahan peraturan dipergunakan diantaranya sebagai sarana pencegahan dan meminimalisir korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peraturan-peraturan pemerintah yang mengalami perubahan salah satunya mengenai peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan Kedua Peraturan Presiden (Perpres) nomor 54 tahun 2010, berperan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi negara.

Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan Kedua Perpres nomor 54 tahun 2010 membawa implikasi pada Peraturan Menteri yang menjadi turunannya yaitu Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07/PRT/M/2011. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan Peraturan Menteri PU nomor 07/PRT/M/2011 terhadap Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Djoko Kirmanto meminta kepada seluruh panitia lelang pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian PU untuk



lebih memahami aturan dan regulasi tender. Permintaan tersebut disampaikan terkait 94 sanggah banding yang masuk ke Menteri PU, 44 diantaranya isi sanggahan banding tersebut benar.

Sanggahan banding yang benar antara lain disebabkan pelaksanaan lelang tidak sesuai dengan ketentuan dalam dokumen lelang, dokumen lelang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan. Sanggah banding juga benar karena pemahaman yang keliru dan lemahnya penguasaan peraturan oleh panitia tender.

Pada kesempatan lain disebutkan beberapa hal yang berubah pada PERPRES 54 tahun 2010 menjadi Perpres 70 Tahun 2012 terkait substansi diantaranya, seperti yang diutarakan Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, "Pemilihan langsung pekerjaan

konstruksi yang sebelumnya hanya dua ratus juta, setelah Perpres baru, bisa sampai lima milyar", tutur Bambang Goeritno, dalam Rapat Kerja Terbatas Kementerian Pekerjaan Umum dalam rangka percepatan penyelesaian program tahun 2012.

Selain itu, mengenai kontrak, yang berkaitan dengan persetujuan kontrak tahun jamak yang didanai APBN, kini disetujui oleh Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan untuk kegiatan yang nilai kontraknya sampai dengan Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) bagi kegiatan penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis, darat/laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, makanan untuk n a r a p i d a n a d i L e m b a g a Pemasyarakatan, pengadaan pita cukai, layanan pembuangan, sampah, dan pengadaan jasa cleaning service.

Lalu untuk kontrak dengan persetujuan Menteri Keuangan yaitu untuk kegiatan yang nilainya diatas Rp.10 M dan kegiatan yang nilainya sampai dengan Rp.10 M yang tidak termasuk dalam kriteria kegiatan sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (2) huruf a. Perpres 70/2012 mempermudah persetujuan kontrak tahun jamak dengan memberikan batas waktu paling lambat 7 hari kerja kepada Menteri Keuangan untuk mengeluarkan persetujuan kontrak tahun jamak.

Mengenai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pada Perpres 54 / 2010 disebutkan bahwa HPS disusun dan ditetapkan PPK untuk semua metode pemilihan penyedia barang / jasa, kecuali kontes / sayembara tidak perlu HPS. HPS Diumumkan pada saat pengumuman lelang, dan HPS Menjadi batas atas penawaran untuk Barang/Pek.Kons/Jasa Lainnya. Pada Perpres 70 / 2012, HPS tidak diperlukan untuk pengadaan langsung yang tidak menggunakan SPK dan Surat Perjanjian. HPS menjadi batas penawaran tertinggi untuk Pengadaan Barang / Pekerjaan Konstruksi / Jasa Lainnya, kecuali untuk Pelelangan yang menggunakan metode dua tahap dan pelelangan Terbatas dimana peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3 (tiga).

Penyesuaian lain yang dilakukan di antaranya meliputi penetapan pemenang oleh Pokja ULP (Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan) untuk nilai jasa konsultansi ≤ Rp. 10 Milyar dan



untuk pekerjaan konstruksi ≤ Rp. 100 Milyar oleh PA (Penguasa Anggaran), serta adanya jaminan sanggah banding sebesar 1% dari HPS dengan masa laku 15 hari kerja.

Semakin besarnya kewenangan yang dimiliki oleh Pokja ULP sebagai konsekuensi dari perubahan peraturan ini membuat Kepala Balai harus mempersiapkan Pokja seoptimal mungkin. Betapa strategis peran pokja sekarang karena dituntut untuk mengambil keputusan penting. Untuk itu perlu capacity building serta reward dan punishment yang sesuai.

Kemudian untuk Pelelangan / Seleksi sebelum tahun anggaran, Perpres Nomor 70 Tahun 2012 lebih mempertegas mengenai pelaksanaan

pengadaan yang mendahului tahun anggaran, khususnya memperjelas mengenai kapan pelelangan dapat diumumkan melalui sumber dana APBN dan APBD. Disebutkan bahwa Kelompok Kerja ULP dapat mengumumkan Pelaksanaan Pengadaan, Setelah penetapan APBD untuk pengadaan yang bersumber dari APBD. Setelah rencana kerja dan anggaran Kementerian / Lembaga / Institusi disetujui oleh DPR untuk pengadaan yang bersumber APBN. Pengumuman mencantumkan kondisi DIPA/DPA belum ditetapkan. Dalam hal DIPA/DPA tidak ditetapkan atau alokasi anggaran dalam DIPA/DPA yang ditetapkan kurang dari nilai pengadaan yang diadakan, proses pemilihan dibatalkan dan kepada Penyedia Barang/Jasa tidak diberikan ganti rugi.



BAUMA 2013 INDONESIA AS THE PARTNER COUNTRY

Indonesia terpilih menjadi partner country pada pameran mesin konstruksi, mesin material bangunan, mesin pertambangan, kendaraan dan alat-alat berat konstruksi termegah di Eropa, BAUMA 2013, yang akan diselenggarakan di Kota Munich, pada 15-21 April 2013 mendatang. Bukan tanpa alasan, dan serta merta mereka memilih Indonesia untuk menjadi partner country di pagelaran akbar ini.

Deputy Secretary (*Parliamentary State Secretary*) Jan Muckle mengatakan bawa Indonesia merupakan negara mitra yang sangat penting untuk Jerman, saat ini telah banyak investor yang menginvestasikan miliaran US Dollar di Indonesia.

“Posisi Indonesia sangat penting, apalagi mengingat kunjungan kanselir Jerman beberapa waktu lalu yang bertemu Presiden RI, Soesilo Bambang Yoedhoyono, yang membicarakan banyak hal,” tambah Jan.

Sementara itu, Klaas Dittich dari Messe Muenchen GmbH, pemilihan Indonesia menjadi negara mitra bukan tanpa alasan. Menurutnya saat ini sektor konstruksi di Indonesia berkembang naik hingga sebesar 7 persen pada 2011, bahkan lebih tinggi dari pertumbuhan di Jerman sendiri yang tidak lebih dari 4 persen per tahun. Tidak hanya itu sektor pertambangan di Indonesia pun meningkat hingga 1,6 persen, sebuah perkembangan yang cukup menjanjikan untuk investasi.

Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto mengungkapkan keterlibatan Indonesia dalam Bauma 2013, diharapkan dapat memberikan

gambaran kepada para investor Eropa mengenai peluang investasi di Indonesia, yang didukung dengan kondisi ekonomi Indonesia yang tumbuh dengan cepat serta situasi politik yang stabil. Djoko Kirmanto menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mendukung investasi swasta dalam proyek infrastruktur di Indonesia, dan mengundang masyarakat Eropa untuk memperluas cakupan investasi infrastruktur, material dan peralatan konstruksi ke wilayah Indonesia.

Morgan Stanley, menyebutkan, Indonesia in The3 Next I in BRIC, Goldman Sachs Group pada 2001, merujuk pada empat negara calon kekuatan ekonomi baru dunia pada 2020. BRIC kepanjangan dari Brazil, Rusia, India dan China. Total produk domestik bruto (PDB) BRIC diperkirakan mencapai US\$30,2 triliun atau melampaui PDB tujuh negara industri maju (G-7) pada 2027. Bahkan, BRIC akan menjadi kekuatan ekonomi paling dominan pada 2050. Indonesia yang memiliki luas daratan hingga lebih dari 3 juta km², memiliki potensi pasar yang besar, dengan jumlah penduduk 230 juta jiwa, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam, bahkan produsen minyak sawit mentah, timah dan eksportir besar batu bara.

Dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen per tahun, RI dinilai menjadi satu dari tiga negara di dunia dengan pertumbuhan ekonomi positif pada 2008 bersama Cina dan India.

PDB per kapita Indonesia pada 2009 sekitar US\$3.900 atau lebih baik dari India yang hanya US\$2.900. Di tambah fiskal Indonesia tergolong sehat dengan defisit hanya 1,6 persen, lebih kecil dari defisit anggaran Rusia sebesar 6 persen, Brasil 3,3 persen, India 10 persen dan China 2,2 persen.

Kepala Badan Pembinaan Konstruksi, Bambang Goeritno, mengatakan bahwa Bauma 2013 sangat penting bagi Indonesia, dimana Pameran tersebut mengangkat Indonesia sebagai vocal point, dengan semua topik pembahasan, pembicaraan dan diskusi ditujukan pada Indonesia yang saat ini mempunyai potensi yang cukup baik dalam pembangunan semua bidang. “Saat ini kita sudah melakukan koordinasi dengan seluruh Kementerian/Lembaga di Indonesia untuk mengisi di Bauma tersebut, mudah2an menjadi cerita sukses, sehingga Indonesia dapat lebih cepat membangun,” tambah Bambang.

Bauma 2013 adalah Pameran dagang Internasional untuk mesin konstruksi, mesin material bangunan, mesin pertambangan, kendaraan dan peralatan konstruksi yang akan dilaksanakan di New Munich Trade Fair Centre Munich Jerman. Bauma terakhir pada 2010 mendatangkan 3.256 peserta dari 53 negara, dengan lebih dari 420.000 pengunjung dari 300 negara. Meliputi total 555.000 meter persegi area pameran, bauma menjadi pameran dagang terbesar di dunia. (Dnd).



PERMEN PU NO. 08 TAHUN 2012 : PEDOMAN PERATURAN LPJK (PERLEM) NOMOR 07, 08, dan 09 tahun 2012



Dengan keluarnya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08 tahun 2012 (Permen PU No.08/2012) tentang petunjuk teknis pembentukan unit sertifikasi dan pemberian lisensi, dipergunakan sebagai dasar bagi LPJKN dalam menyusun pedoman pembentukan unit sertifikasi dan pemberian lisensi.

Ruang lingkup pengaturan dalam Permen ini meliputi pembentukan Unit Sertifikasi tingkat Nasional dan Provinsi serta Pemberian Lisensi kepada unit Sertifikasi Tingkat Provinsi bentukan Lembaga dan Unit Sertifikasi Tingkat Nasional bentukan masyarakat jasa konstruksi.

LPJKN menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Lembaga (Perlem) Nomor 07 tahun 2012 tentang komite lisensi unit sertifikasi dan tata cara Pemberian lisensi, Perlem Nomor 08 tahun 2012 tentang pembentukan unit sertifikasi badan usaha jasa Konstruksi, Perlem Nomor 09 tahun 2012 tentang Pembentukan unit sertifikasi tenaga kerja Konstruksi.

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan percepatan Pembentukan unit sertifikasi tingkat nasional, tingkat provinsi dan bentukan masyarakat jasa konstruksi serta pemberian lisensi oleh Lembaga tingkat nasional.

Dalam pelaksanaan tugas, unit sertifikasi melakukan registrasi tenaga kerja konstruksi dan badan usaha, lembaga membentuk unit sertifikasi tenaga kerja dan unit sertifikasi badan usaha. Unit Sertifikasi selain yang dibentuk oleh Lembaga, masyarakat jasa konstruksi dapat membentuk unit sertifikasi tenaga kerja. Tugas Unit Sertifikasi diantaranya, membantu tugas Lembaga dalam melakukan tugas

registrasi melalui penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja atau badan usaha, Unit sertifikasi menerbitkan berita acara kelayakan hasil penilaian klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja dan badan usaha. Unit sertifikasi memiliki alat kelengkapan yang terdiri dari, unsur pengarah (*board*), unsur pelaksana, dan asesor.

Dalam Permen PU nomor 08 tahun 2012 menjelaskan garis besar Proses Pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha / Tenaga Kerja bentukan lembaga, secara singkat dijelaskan sebagai berikut:

Lembaga menetapkan Tim Pembentuk Unsur Pengarah, dilakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan yang membutuhkan penyedia jasa yang mampu, lalu tahap selanjutnya dilanjutkan dengan, tim pembentuk unsur Pengarah menyusun daftar personil pemangku kepentingan untuk setiap klasifikasi usaha, kemudian Tim Pembentuk Unsur Pengarah memfasilitasi Rapat Penetapan Unsur Pengarah, dalam Rapat Penetapan Unsur Pengarah tersebut menghasilkan Berita Acara : Ketua dan anggota Unsur Pengarah, Lembaga mengukuhkan dan

mengumumkan nama-nama pemangku kepentingan sesuai Berita Acara sebagai Pengarah Unit Sertifikasi, kemudian setelah unsur pengarah terbentuk, mereka yang membentuk unsur pelaksana dan merekrut asesor.

Tim Pembentuk Unsur Pengarah, Diinisiasi, dibentuk, dan ditetapkan oleh LPJK, mereka bertanggungjawab kepada LPJK, dengan melakukan kewajiban mengumpulkan nama-nama stakeholder per klasifikasi usaha, memfasilitasi Rapat Penetapan Unsur Pengarah, dan menyerahkan Berita Acara Rapat Perdana Unsur Pengarah kepada LPJKN. Dengan menghasilkan output tim, yakni Long List stakeholder per klasifikasi usaha dan tenaga kerja.

Selanjutnya proses pembentukan unsur pelaksana unit sertifikasi (US), badan usaha & tenaga kerja (BU & TK). Lembaga harus menetapkan mekanisme rekrutmen dan kriteria unsur pelaksana, unsur pengarah lah yang menyelenggarakan rekrutmen unsur pelaksana, unsur pengarah pula yang melaksanakan seleksi personil yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan lembaga, kemudian menetapkan siapa saja personil yang





duduk di unsur pelaksana. Terakhir lembaga mengumumkan personil yang telah ditetapkan sebagai unsur pelaksana melalui media cetak nasional dan website.

Pada proses pembentukan assessor dalam unit sertifikasi, proses singkatnya, diantaranya : lembaga menetapkan mekanisme rekrutmen dan kriteria asesor, melakukan rekrutmen oleh unsur pengarah (USBK/TK), unsur pengarah melaksanakan seleksi personil asesor yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan lembaga dan Permenpu 10/2010. Kemudian, unsur pengarahlah yang menetapkan asesor badan usaha jasa pelaksana/tenaga kerja tingkat nasional, lalu sama dengan, pembentukan unsur pelaksana, harus diumumkan melalui media cetak nasional dan website sebagai Asesor.

Untuk pemberian Lisensi, lembaga Tingkat Nasional memberikan Lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Bentuk Masyarakat yang telah memenuhi persyaratan. Lisensi sebagaimana berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak penerbitan lisensi dan dapat diperpanjang. Jika Unit Sertifikasi Badan Usaha dan/atau Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Tingkat Provinsi di suatu provinsi belum mendapatkan lisensi maka tugas dan fungsi Unit

Sertifikasi tersebut dilaksanakan oleh Unit Sertifikasi Badan Usaha dan/atau Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional.

Pemberian Lisensi diatur secara teknis dalam Peraturan Lembaga (PERLEM) no. 07 tahun 2012 tentang komite lisensi unit sertifikasi dan tata cara pemberian lisensi. Peraturan LPJK ini dipergunakan sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan tugas Komite Lisensi dalam rangka pemberian Lisensi kepada USBK Provinsi, USTK Provinsi, dan USTK Masyarakat.

Dengan keluarnya Perlem ini maka diharapkan tujuan dapat tercapai diantaranya, mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian Lisensi kepada USBK dan USTK, memastikan pelaksanaan kegiatan Lisensi adalah valid, dan dapat ditelusuri terhadap ketentuan peraturan, peraturan perundangundangan, standar nasional, dan standar internasional, serta memastikan persyaratan sistem manajemen mutu USBK dan USTK dipenuhi dan diimplementasikan. Lingkup Peraturan ini meliputi komite unit sertifikasi, manajemen, tahapan prosedur pemberian Lisensi, dan sanksi. Sedangkan mengenai teknis pembentukan Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBK) Jasa Konstruksi, ditindaklanjuti oleh PERLEM nomor 08 tahun 2012. Pengaturan pembentukan USBK berlandaskan pada asas ketidakberpihakan, keadilan,

kemanfaatan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, transparan, dan akuntabel. Peraturan lembaga pengembangan jasa konstruksi dimaksudkan sebagai pedoman bagi LPJK dalam membentuk USBK. Peraturan lembaga pengembangan jasa konstruksi bertujuan mewujudkan tertib pelaksanaan pembentukan USBK. Lingkup pengaturan peraturan ini meliputi pembentukan unit sertifikasi badan usaha, unsur pengarah, unsur pelaksana, asesor kemampuan badan usaha, pengaduan masyarakat jasa konstruksi, pelanggaran dan pengawasan unit sertifikasi badan usaha, manajemen mutu unit sertifikasi badan usaha, sanksi dan rehabilitasi asesor, serta pemberhentian asesor kemampuan badan usaha.

Sementara itu, PERLEM nomor 09 tahun 2012, dibuat untuk menindaklanjuti pembentukan secara teknis dari Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi (USTK). Memiliki azas pembentukan yang sama dengan perlem no. 08 / 2012. Tujuan peraturan LPJK ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi LPJK dalam proses pembentukan dan pengelolaan USTK. Peraturan LPJK ini bertujuan mewujudkan tertib proses pembentukan dan pengelolaan USTK. Dengan lingkup pengaturan meliputi Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Nasional, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Provinsi, Unit Sertifikasi Tenaga Kerja Masyarakat, Pembentukan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, Sanksi, Rehabilitasi Asesor Kompetensi, Pengaduan Masyarakat, Penyelenggaraan, Pengawasan, dan Manajemen Mutu Unit Sertifikasi Tenaga Kerja. (Dnd).



KEMENTERIAN PU TIMOR LESTE MEMBUTUHKAN SUPPORT LEBIH DARI INDONESIA

“Berdasarkan data (BCIAsia dan sumber lain), nilai kapitalisasi konstruksi berupa pekerjaan yang ditawarkan pada lima negara ASEAN (Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam) untuk kuartal pertama tahun 2012 adalah sekitar USD\$14,7 miliar. Sedangkan, Timor Leste menawarkan proyek konstruksi senilai tidak kurang dari USD\$2,8 miliar untuk periode tahun 2011-2015. Pertanda bahwa pasar jasa konstruksi di ASEAN dan Timor Leste menjadi perhatian dari pelaku jasa konstruksi nasional untuk mengembangkan sayap ke luar negeri”

Tepatnya satu tahun yang lalu di tahun 2011, tanggal 22 Maret 2011, di sektor Infrastruktur terdapat kesepakatan teknis antara Kementerian Pekerjaan Umum RI dengan Kementerian Infrastruktur Timor Leste. Kerjasama bidang Infrastruktur dalam MoU tersebut meliputi bidang jalan dan jembatan, penyediaan air dan sanitasi, perumahan dan pemukiman. Kerjasama diatur meliputi antara lain kerjasama kontraktor kedua negara, pelaksanaan program pelatihan, saling tukar informasi, saling tukar dan penugasan pejabat tinggi dan tenaga ahli.

Pada awal November 2012 lalu, Menteri PU Republik Indonesia Djoko Kirmanto menerima kunjungan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Timor Leste, Gastao De Sausa, di kantornya, Jakarta. Menindaklanjuti pertemuan tahun sebelumnya yang digagas Menteri Infrastruktur Timor Leste, Pedro Lay, (untuk diketahui : semenjak perubahan kabinet Agustus 2012 lalu, Menteri Infrastruktur Timor Leste, Berubah menjadi Menteri PU Timor Leste) Menteri PU Timor Leste melakukan silaturahmi untuk lebih mempererat hubungan bilateral kedua negara dalam bidang ke-PU-an.

Gastao ingin mensukseskan program kerja bidang PU di negaranya, hal utama yang dibutuhkan ialah ketersediaan SDM yang berkualitas. Dengan alasan tersebut, pihaknya selama ini selalu terus berkomunikasi dan menjalin



kerjasama di bidang peningkatan SDM konstruksi.

Pemerintah Timor Leste telah mengirimkan pegawainya untuk mengikuti pelatihan yang diadakan Badan Pembinaan (BP) Konstruksi Kementerian PU di Bandung, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur. Hingga saat ini, sudah ada sejumlah pegawai Kementerian PU Timor Leste yang dikirimkan untuk pelatihan sebanyak 4 batch di Indonesia.

Menteri PU RI, Djoko Kirmanto melihat hal yang positif dalam kerjasama Indonesia-Timor Leste yang sudah

terjalin ini. Menurutnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun sempat meminta dan mengatakan Timor Leste merupakan saudara dan tetangga terdekat yang harus dibantu pembangunannya. “Kami akan membantu dan memfasilitasi peningkatan kualitas SDM bidang teknis dan jasa konstruksi Timor Leste” Ujar Djoko.

Peningkatan kemampuan SDM bidang ke-PU-an di Timor Leste dinilai urgent. Pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur di Timor Leste, sudah di depan mata. Timor Leste berencana membangun jalan tol empat lajur



sepanjang 34 Kilometer (Km) dari utara menuju selatan pada 2 tahun depan. Disusul setelah itu akan ada pembangunan jalan sepanjang 150 Kilometer. Timor Leste mengakui memerlukan *technical assistance* dari Kementerian PU Indonesia.

Workshop Pengembangan Sektor Jalan di Dili

Pengembangan sektor jalan merupakan infrastruktur utama bagi pembangunan sosial ekonomi di Timor Leste. Namun di sisi lain, kemampuan aparatur negara Kementerian Pekerjaan Umum (PU) negara tersebut dinilai masih sangat lemah. Menyadari hal tersebut, pada Rapat Tahunan Japan-Southeast Asia Meeting on South-South (J-SEAM) di Manila, Filipina pada Juni 2010 memutuskan perlunya program pelatihan bagi mereka.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Republik Indonesia Agoes Widjanarko menilai pentingnya peningkatan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) bidang jalan dan jembatan di Timor Leste. Hal tersebut guna menangani belum optimalnya kondisi jalan di negara tersebut.

Agoes Widjanarko berkesempatan memimpin workshop Pengembangan Sektor Jalan di Dili, Timor Leste, pada 26 November lalu. Workshop tersebut diadakan sebagai kerjasama triangular

antara Kementerian PU Indonesia, Kementerian PU Timor Leste dan Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA). Workshop tersebut juga sebagai tindak lanjut pelatihan peningkatan kapasitas SDM bidang jalan dan jembatan yang dilakukan Kementerian PU Indonesia melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) terhadap Kementerian PU Timor Leste dengan dibiayai oleh JICA.

Dari data yang didapat, sekitar 80 persen kondisi jalan di negara bekas jajahan Portugal tersebut dalam kondisi rusak. Oleh karena itu, pembangunan dan perbaikan jalan menjadi langkah penting guna mendukung pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Kementerian PU Indonesia telah melakukan program pelatihan bagi SDM sektor jalan dan jembatan Timor Leste. Melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Kementerian PU Indonesia sebanyak empat kali di Bandung, Jawa Barat dan Surabaya, Jawa Timur pada 2011-2012. Pusdiklat menyiapkan dan memberikan materi pelatihan berdasarkan kebutuhan Timor Leste yang meliputi aspek perencanaan, konstruksi, pelaksanaan dan pemantauan, dan pekerjaan dan pemeliharaan sektor jalan.

Menteri PU Timor Leste Gastao De Saosa mengakui kualitas SDM aparatnya yang masih harus ditingkatkan, sehingga dapat meminimalisir salah satu kendala pembangunan jalan, selain minimnya anggaran dan belum optimalnya kompetensi kontraktor dan konsultan di negaranya. Gastao mendukung penuh agar pelatihan terus dilanjutkan. Kementerian PU Timor Leste minta juga selanjutnya Pelatihan diarahkan selain kepada unsur aparat pemerintah namun juga kepada mitra yakni kontraktor dan konsultan di Timor Leste agar dapat berkembang bersama. Selain itu, Pemerintah Timor Leste meminta penyedia jasa lokal dilibatkan untuk bermitra dengan penyedia jasa asing dalam pengerjaan proyek pembangunan mereka (Contoh : BUMN Wijaya karya, dengan Kontraktor local CNT dalam proyek jembatan Komoro).



Sementara itu, Kepala Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, BP Konstruksi, Panani Kesai, mengutarakan, “kebutuhan pelatihan untuk peningkatan SDM di Timor Leste tidak saja sebatas pelatihan untuk rehabilitasi / pemeliharaan jalan dan jembatan, namun perlu juga dilatihkan aspek perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian / pengawasan serta peralatan (alat berat). Khusus bagi aparat pimpinan pemerintah Timor Leste sebaiknya mengikuti pelatihan *Project Cycle* untuk memperluas wawasan dalam pengembangan infrastruktur tidak saja bidang jalan dan jembatan tapi seluruh bidang pekerjaan umum”.

Peluang Pembangunan Proyek di Timor Leste

Menurut Duta Besar Indonesia untuk Timor Leste, Eddy Setiabudhi, pada dasarnya pembangunan dan rehabilitasi Infrastruktur dan Industri strategis di Timor Leste terbuka untuk badan usaha asing melalui proses tender terbuka, keterbukaan itu tidak terlepas dari keterbatasan kapasitas kelembagaan dan keterbatasan penguasaan teknologi di negara tersebut, sehingga membuka peluang bagi Asing untuk terlibat dalam program atau proyek pembangunan di Timor Leste.

Ditambah kemampuan Pemerintah Timor Leste cenderung meningkat, dalam hal pembiayaan berbagai program pembangunan, walaupun



masih sangat tergantung pada sumber pendapatan migas. Menurut Eddy, Timor Leste termasuk dalam kategori 'least developed country' yang tidak mempunyai hutang luar negeri.

Terobosan Pemerintah Timor Leste dalam rangka pengawasan dan evaluasi tender proyek-proyek pembangunan yang dibiayai oleh APBN, diantaranya dengan membentuk *National Development Agency* (NDA) yang bertanggungjawab langsung kepada Perdana Menteri. Tenaga ahli yang sudah dikirim dari Indonesia yang bekerja di NDA saat ini mempunyai peranan sangat penting dalam memverifikasi seluruh proyek-proyek infrastruktur di Timor Leste termasuk bidang jalan/jembatan.

Diharapkan dengan adanya pendampingan oleh Tenaga Ahli Indonesia, Kementerian PU Timor Leste beserta aparatnya dapat berkembang bersama NDA dan dapat meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan aparat Kementerian PU Timor Leste.

Dari kondisi yang digambarkan mengenai badan usaha jasa konstruksi asing di Timor Leste, kontraktor dari Indonesia saat ini masih mendominasi atau sekitar 40 % dari jumlah Badan Usaha Asing yang ada di Timor Leste. Badan Usaha dari Indonesia yang berkiprah di Timor Leste diantaranya PT. PP, PT. Adhi Karya, PT. Wijaya Karya, serta PT. Duta Graha.



Eddy Setiabudhi pun berpandangan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh pelaku jasa konstruksi Indonesia akan beberapa kondisi di Timor Leste. Kondisi tersebut antara lain peraturan yang masih sangat terbatas, lembaga peradilan yang masih terbatas kapasitasnya bahkan untuk keberadaan ahli hukum seperti pengacara pun masih terbatas, serta akses transportasi dan komunikasi belum banyak menunjang. “Tapi itulah seninya, jangan sampai karena halangan melunturkan semangat pelaku jasa konstruksi untuk maju memasuki peluang di Timor Leste”, tutur Eddy Setiabudhi. (dnd berbagai sumber).

Charity Golf Tournament Konstruksi Indonesia 2012 : ANTARA KOMPETISI DAN KEPEDULIAN SOSIAL

Jakarta - Berbagai rangkaian kegiatan dalam rangka Konstruksi Indonesia 2012 telah dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum sejak tahun 2003, tentunya dengan dukungan penuh masyarakat konstruksi di Indonesia. Beberapa rangkaian kegiatan tersebut berasal dan diperuntukkan bagi kemajuan dan perkembangan jasa konstruksi Nasional pada umumnya, tentunya dengan berbagai bentuk dan ide segar yang memberi variasi dalam pelaksanaannya.

Salah satu bentuk variasi kegiatan dalam rangkaian kegiatan Konstruksi Indonesia tersebut adalah dilaksanakannya Charity Golf Tournament sejak tahun 2008. Menjadi sebuah bentuk kegiatan yang berbeda, karena kegiatan ini juga menjadi ajang olah tubuh sekaligus kompetisi yang dikemas dalam suasana keakraban.

Di tahun 2012 ini, Charity Golf Tournament Konstruksi Indonesia dilaksanakan pada Sabtu (1/12) di



Royale Golf Club Jakarta, yang dibuka secara resmi (tee off) oleh Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak tepat pukul 07.00 WIB.

Turnamen ini diikuti oleh sekitar 200 orang peserta dari berbagai kalangan, terutama dari masyarakat konstruksi di Indonesia. Dan sesuai dengan nama event, hasil pengumpulan dana dari Tournament ini akan disumbangkan kepada beberapa yayasan sosial.



Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno dalam sambutannya sesuai turnamen mengatakan bahwa Turnamen Golf ini tidak hanya menjadi ajang bermain olahraga saja, tetapi tempat berkumpulnya masyarakat konstruksi di Indonesia untuk saling mengenal dan berkoordinasi. "Semoga acara seperti di kemudian hari terus dapat dilaksanakan bahkan ditingkatkan lagi", tambah Bambang Goeritno.

Para pemenang Turnamen Golf Konstruksi Indonesia 2012 antara lain sebagai berikut : Best Gross Overall Edi Winata; Best Nett Overall Rustanto; Flight A, Best Gross Agus Kana, Best Nett I Suhendi, Best Nett II Hardy Siahaan; Flight B, Best Gross Lucky Eko, Best Nett I Thamrin, Best Nett II Ali Zaki; Flight C, Best Gross M. Maulana, Best Nett I Sujianto, Best Nett II Made Jaya.

Nearest to The Pin Suhendi, Nearest to The Line Yusarwanto, dan Longest Drive Yudiyanto. Sedangkan untuk kategori Beregu, Best Team I : Grup IGC 3, Best Team II: ITB 75, serta Best Team III : JM 1.

Penyerahan Charity

Penyerahan sumbangan hasil Tournament Golf Konstruksi Indonesia 2012 dilakukan oleh Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Bambang Goeritno Senin (17/12), kepada beberapa yayasan sosial antara lain Dharma Wanita Persatuan Kementerian PU sebesar 50 juta rupiah, Rumah Pintar asuhan Dharma Wanita Persatuan Kementerian PU sebesar 75 juta rupiah, Yayasan Pendidikan Putra 75 juta rupiah, serta Dharma Wanita unit Badan Pembinaan Konstruksi sebesar 100 juta rupiah.

Serah terima santunan sumbangan tersebut, dilaksanakan bersamaan dengan acara Ulang Tahun Dharma Wanita Persatuan Kementerian PU yang ke-13. "Kami segenap panitia Charity Golf KI 2012 berharap semoga bantuan ini dapat menjadi manfaat bagi berbagai pihak", ujar Bambang Goeritno. * tw



Charity Golf Konstruksi Indonesia 2012





Juara I Kompetisi Foto Konstruksi Indonesia 2012 Kategori : Bebas
Judul Foto : Membangun Gedung Seribu Lubang, Pengirim : Gholib



Juara I Kompetisi Foto Konstruksi Indonesia 2012, Kategori : Hitam Putih
Judul Foto : Pembangunan di Pesisir Jakarta, Pengirim : Hendra Permana

KISAH TAULADAN SEORANG PEMIMPIN

Oleh: Prof Dr H Fauzul Iman MA

Suatu hari Umar bin Abdul Aziz menyewa seekor unta dari seorang pemilik unta untuk perjalanan ke luar kota. Di tengah perjalanan yang kanan dan kirinya penuh dengan pepohonan, tiba-tiba serban Umar tersangkut pohon dan jatuh ke tanah. Setelah satu kilometer, Umar baru diberi tahu bahwa serbannya terseret pohon. Lalu, Umar turun dari unta dan berjalan mengambil serbannya.

“Wahai Amirul Mukminin mengapa engkau mengambil sendiri serban itu? Bukankah kita bisa mengambilnya dengan mengendarai unta,” tanya sang pemilik unta kepada Umar terheran-heran. “Tidak, saya menyewa unta hanya untuk pergi bukan untuk kembali,” ujar Umar. “Mengapa engkau tidak menyuruhku mengambilnya,” tanya pemilik unta penasaran. “Tidak juga, karena serban itu bukan milikmu, tapi milikku,” ujarnya dengan mantap.

Kisah di atas menggambarkan keteladanan seorang pemimpin yang patut ditiru dalam memanfaatkan kedudukannya. Meski Umar berkedudukan sebagai khalifah, ia tidak ingin seenaknya memerintah atau memperlakukan rakyatnya tanpa kendali. Baginya, kedudukan bukanlah sekat atau struktur egoisme atau kesombongan, tapi menjadi jembatan untuk memberikan jalan terbaik bagi rakyatnya.

Umar juga tak pernah melampaui batas dalam menggunakan barang milik rakyat ketika dia harus menyewanya. Pendek kata, Umar Abdul Aziz adalah sosok pemimpin lurus (adil) yang tidak semaunya menggunakan tenaga kaum lemah. Ia tidak duduk terlena di atas tahta singgasana.

Umar Abdul Aziz adalah pemimpin yang sangat cepat mencairkan kebekuan rakyat dengan jalan arif dan memudahkan. Pangkat dan kedudukannya tidak menjadikannya jadi penghalang untuk turun ke lapangan guna membantu dan menyelesaikan segala kesulitan yang dihadapi rakyat. “Permudahlah urusan umat manusia dan janganlah kalian mempersulit,” sabda Nabi SAW.

Di abad modern ini, justru terjadi perbedaan yang sangat mencolok. Sebagian pemimpin kita masih saja senang berulah. Padahal, segala jabatan telah diraihinya. Harta berlimpah namun tetap saja merasa kekurangan. Kemudian, seenaknya mengambil harta negara. Baik dengan cara korupsi, mark up, mengemplang pajak, dan money laundry (pencucian uang). Bahkan, ada yang mengambilnya dengan cara memeras tenaga kaum lemah (buruh dan TKW).

Tindakan hukum telah dikerahkan untuk mengatasinya. Ironisnya, kejahatan korupsi itu tetap saja menjadi-jadi. Imbasnya justru pemerintahan tidak memiliki wibawa untuk mencegah segala bentuk kriminalitas yang kian menjamur. Bukan hanya korupsi, kekerasan lain seperti pembunuhan sadis, perampokan, bahkan kekerasan geng motor pun semakin meningkat.

Semua itu terjadi karena tiadanya keteladanan kepemimpinan. Di saat rakyat diperintah untuk menghemat energi, para pemimpin justru lebih senang bergelimang kemewahan dengan harta hasil korupsinya. “Negeri yang dahulunya aman dan berlimpah kemahmuran, tiba-tiba ditimpa bencana kelaparan dan ketakutan karena ulah perbuatan para pemimpinnya yang ingkar pada nikmat Tuhan-Nya.” (QS An Nahl: 112). (Disadur dari : Republika.co.id;2012)



*Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
mengucapkan selamat kepada*

*Penerima Penghargaan Penilaian Kinerja Pemerintah Daerah (PKPD)
Sub Bidang Jasa Konstruksi,*

Kategori Provinsi :

**Terbaik I Provinsi DI Yogyakarta
Terbaik II Provinsi Jawa Tengah**

Kategori Kabupaten / Kota :

**Terbaik I Kabupaten Ponorogo
Terbaik II Kabupaten Kulon Progo
Terbaik III Kabupaten Banjar**

Penerima Penghargaan Khusus : Kabupaten Gresik

*Semoga penghargaan ini dapat terus memotivasi Provinsi/Kab/Kota
membangun keunggulan dan kemandirian konstruksi Indonesia.*

*Segenap Keluarga Besar
Badan Pembinaan Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum
Mengucapkan*

*Selamat Hari Natal
25 Desember 2012*

&

Selamat Tahun Baru 2013